

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DI SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB. LEBAK

Amara Austin* Ela Widasari** Imas Fatimah***

*, **, *** Universitas La Tansa Mashiro. Rangkasbitung, Indonesia

Article Info

Keywords:

clarity of budget goals,
accounting control,
accountability,
performance.

Corresponding Author:

amaraaustin88@gmail.com

The Asia Pacific Journal of Management Studies

Volume 10 dan Nomor 2

Mei - Agustus 2023

Hal. 145 - 152



©2023 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstract

The Regional Secretariat (SETDA) is an auxiliary element of the local government is a public organization. This study aims to test and analyze the effect of clarity of budget goals and accounting control on performance accountability in the Regional Secretariat of Lebak Regency. This research uses quantitative methods by collecting data using primary data. The population in this study was 91 respondents to setda employees. The sample in this study used a total sampling of only 63 respondents. This study used a likert scale. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The result of this study is that clarity of budget goals on performance accountability has no effect. For the influence of accounting control on performance accountability has an effect. For clarity of budget goals and accounting control of performance accountability affects simultaneously in the Regional Regional Office of Lebak Regency..

Sekretariat Daerah (SETDA) adalah unsur pembantu pemerintah daerah merupakan organisasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah Kab. Lebak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 91 responden karyawan setda. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yang hanya terkumpul 63 responden. Penelitian ini menggunakan skala likert. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh. Untuk pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja berpengaruh. Untuk kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja berpengaruh secara simultan di Setda Kab. Lebak..

PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah (SETDA) adalah unsur pembantu pemerintah daerah merupakan organisasi publik. Dengan demikian untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut SETDA dituntut untuk memiliki akuntabilitas kinerja yang professional untuk mengelola anggaran yang sudah disetujui melalui APBD dan dana alokasi khusus (DAK) yaitu bantuan pemerintah pusat. Akuntabilitas kinerja ini sangat penting bagi instansi pemerintah. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Wahyuddin (2018:40) bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban bagi suatu instansi pemerintah untuk memper tanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem akuntabilitas secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas kinerja yaitu salah satu kunci pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lembaga publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses akuntabilitas publik. Proses itulah yang menentukan penilaian keberhasilan organisasi publik dalam mencapai sasarannya. Aliansi baru organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan layanan yang diberikan. Kinerja organisasi dapat dicapai dengan merampingkan dan mengoptimalkan hasil proses organisasi. Proses-proses tersebut adalah perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelayanan, pelaporan keuangan, audit, dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas tersebut termasuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat umum dan pengguna lain. Sehingga hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk menilai akuntabilitas pemerintah untuk semua kegiatan yang dilakukan. Bukan hanya kegiatan keuangan saja, Keputusan sosial dan politik juga, dalam pertanggungjawabannya, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, seperti anggaran, akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan sistem pelaporan. Akuntabilitas publik berarti

bahwa informasi tentang kegiatan dan kinerja pemerintah diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai aktor yang memberikan informasi untuk mewujudkan hak-hak masyarakat.

Terjadi fenomena pada akuntabilitas kinerja yang saya ambil dari berita HARIAN BANTEN.CO.ID, LEBAK – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali menyelenggarakan Acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021 secara hybrid (daring dan luring). Acara tersebut merupakan akhir dari rangkaian kegiatan evaluasi SAKIP dan RB yang setiap tahunnya dilakukan oleh Kemenpan-RB pada Instansi Pemerintah dalam rangka membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso bersama jajaran turut menghadiri acara tersebut secara daring melalui platform zoom meeting. Bertempat di Ruang Kerja Sekda, Selasa (5/4/2022). Dalam evaluasi sistem SAKIP dan RB Award 2021 tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak mendapat predikat BB. Dengan predikat ini maka Pemkab Lebak didorong untuk lebih baik dalam mengelola akuntabilitas kinerja terutama dalam mengelola penggunaan anggaran yang tepat sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini dalam keterangannya, menyampaikan, bahwa implememtasi SAKIP pada instansi Pemerintah juga merupakan bagian dari pergeseran praktik dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik, dan anggaran berbasis kinerja. “Untuk itu semua Instansi Pemerintah dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,” jelasnya. Dikatakannya, hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden yaitu peningkatan

efektifitas dan efisiensi Pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. “Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB SAKIP, BB, A, dan AA,” katanya.

Menurut Madelyn (2020) setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi yang akan datang. Aktivitas organisasi ini dinyatakan dalam visi misi yang dibuat oleh organisasi, adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi. Untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat.

Rusdiana dan Nasihudin (2018:40) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini setujuan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 1 yang menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dan pada pasal 8 pada ayat 1 dan 2 tentang perjanjian

kinerja yaitu setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja.

Menurut Amiruddin (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Menurut Sasando, dkk (2020) Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu karyawan untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka dapat mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan kebingungan, ketidaknyamanan dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai apa yang diharapkan. Penyusunan anggaran adalah proses yang berbeda antara sektor swasta dan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Di dalam penyusunan anggaran, keterlibatan berbagai komponen unit kerja di suatu instansi sangat diperlukan. Dahulu penganggaran telah dilakukan dengan sistem top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan atau pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disiapkan. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka memberi informasi lokal yang diketahui. Dengan cara inilah, bawahan dapat berkomunikasi atau

mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang mungkin dapat dimasukkan dalam standar atau anggaran sebagai dasar penilaian.

Menurut Anisa dan Sri (2019) dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung jawab kepala daerah kepada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya mendapatkan dua hal penting dalam menerapkan sistem tersebut. Pertama, percepat proses dan tingkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Kedua, penggunaan sistem sistem tersebut memungkinkan kepala SKPD membuat agar membuat keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi agar lebih efektif dan efisien.

Menurut hery (2014:14) untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan akuntansi (informasi), perusahaan biasanya diterapkan beberapa prinsip tertentu. Pengendalian akuntansi biasanya benar-benar diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya transaksi bisnis perusahaan. untuk menjalankan pengendalian akuntansi secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan tambahan biaya. Sedangkan dalam penelitian Hidayattullah dan Herdjiono (2015) dalam penelitian Lutfiah dan Nur (2021) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi adalah sebuah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para kepala instansi pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengontrol setiap kegiatan organisasi lebih efektif, dan memilih alternatif terbaik untuk setiap masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi (Zakiyudin dan Suyanto, 2015). Instansi pemerintah yang memiliki sistem akuntansi yang handal dan diterapkan dengan praktik yang sehat maka informasi yang dihasilkan dapat membantu meningkatkan kinerja suatu instansi tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Menurut Hardani, dkk (2020:255) bahwa penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur. Hal ini karena ada data yang dijadikan landasan untuk menghasilkan informasi yang lebih terukur. Penelitian kuantitatif tidak memperlakukan hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian karena hasil penelitian lebih banyak tergantung dengan instrument yang digunakan dan terukur variabel yang digunakan, dari pada intim dan keterlibatan emosi antara peneliti dengan subyek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019:126) "Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti." Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Karyawan yang berada di Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah (SETDA).

Menurut Sugiyono (2019) dalam penelitian kuantitatif "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi." Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling total yang hanya terkumpul 63 dari 91 Responden. Menurut Sugiyono (2019:134) "Sampling total adalah Teknik pengembalian sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua."

Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi terstruktur dan membagikan kuesioner kepada responden. Menurut Sugiyono (2019:204) "Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya." Sedangkan menurut Sugiyono (2019:199) Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yaitu Teknik pengumpulan data yang

efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji ini adalah uji hipotesis, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

Tabel 4 Uji Parsial (t)

Coefficients ^a			
	Model	T	Sig.
1	(Constant)	2,352	0,022
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,651	0,518
	Pengendalian Akuntansi	5,118	0,000

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,518 > 0,05$ dan nilai thitung $0,651 > t_{tabel} 0,244$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak berpengaruh.

Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,118 > 0,244$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti berpengaruh.

Tabel Uji Simultan (F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1028,859	2	514,430	16,481	,000 ^b
Residual	1872,792	60	31,213		
Total	2901,651	62			

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $16,481 > 3,14$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

Pembahasan

Berdasarkan pada nilai analisis regresi memperoleh koefisien regresi sebesar 0,120 untuk variabel kejelasan sasaran anggaran

menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 1 satuan maka nilai akuntabilitas kinerja akan meningkat sebesar 0,120. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Indah dan Haryanto, dkk (2022) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dikarenakan adanya ketidak konsistenan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Adapun hasil penelitian yang tidak sejalan yang dilakukan Deni, dkk (2021) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Dikarenakan terdapatnya sasaran anggaran yang nyata, yang berarti akan mempermudah dalam mengamankan kesuksesan/kegagalan penerapan tugas organisasinya yang memenuhi tujuan serta sasaran yang sudah diputuskan terdahulu.

Berdasarkan pada nilai analisis regresi memperoleh Nilai koefisien regresi sebesar 0.867 untuk variabel pengendalian akuntansi menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 1 satuan maka nilai akuntabilitas kinerja akan meningkat sebesar 0,867. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Nur Ariyandani, dkk (2020) yang berjudul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat dilihat dari manfaat pengendalian akuntansi itu sendiri, pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa Langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas. Adapun pada hasil penelitian yang tidak sejalan yang dilakukan oleh Helin dan Eka (2022) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini dikarenakan bahwa semakin baik pengendalian

akuntansi maka tidak menjamin meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Diketahui nilai signifikansi untuk kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $10,654 > 3,14$ sehingga dapat disimpulkan signifikan dan berpengaruh simultan. Pada penelitian Amiruddin Gani (2020) dengan judul kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja yaitu menyatakan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan terhadap kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap laporan akuntabilitas kinerja. Juga pada penelitian Anisa dan Sri (2019) dengan judul kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas bahwa Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja dapat disimpulkan dengan Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,518 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,651 > t_{tabel} 0,244$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang berarti tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan nilai kejelasan sasaran anggaran. Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,118 > t_{tabel} 0,244$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $16,481 > 3,14$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y .

Daftar Pustaka

- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077>
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Benediktus Manullang, S., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Pergantian Kepala Skpd Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 62–73.
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20.
- Endaryati, E. (2021). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Gani, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ekonomika*, 13(2), 104–116.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Hardani. Andriyani, Helmina. Ustiawary, Jumari. Utami, Evi, Fatmi. Istiqomah, Ria,

- Rahmatul. Fardani, Roushandy, Asri. Sukmana, Dhika, Juliana. Auliya, Nur, H. (2020). METODE PENELITIAN Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariato, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Aplikasi Akuntansi, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hery. (2014). Pengendalian Akuntansi dan Manajemen. KENCANA.
- Imam, G. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jusup, H. (2014). AUDITING (Pengendalian Berbasis ISA).
- Kejelasan, P., Anggaran, S., Akuntansi, P., & Kinerja, A. (2020). Tata kelola. 7. Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Natalia, P. L., Kalangi, L., & Warongan, J. D. . (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Dan Pengendalian Akuntansi Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 115–121. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22312.2019>
- Nurji, N., Asmoni, T., & Surasni, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. E-Jurnal Akuntansi, 29(2), 604. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p09>
- RANDAL J. ELDER, mark s. beasley, alvin a. arens, & amir abadi jusuf. (2012). JASA AUDIT DAN ASSURANCE.
- Rusdiana. Nasihudin. (2018). Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
- Saleh, Choirul. Sangadji, S. S. D. T. (2020). AKUNTABILITAS KINERJA Anggaran Pemerintah Daerah.
- Sasando Dewi Soeksin, Zul Friandi, S., & Rifai, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan. Jaman, 1(1), 40–47.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.
- Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi, 15(2), 477–492. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>
- Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Tirtayasa Ekonomika, 14(2), 204. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>

Yuliastuti, E., & Riharjo, I. (2020). Pengaruh kompetensi petugas, pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10).